

Penguatan Ekonomi Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru

Muhammad Hidayat*¹, Neng Murialti¹, M. Fikry Hadi¹, Mizan Asnawi¹, Dwi Widiarsih¹

¹Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail: m.hidayat@umri.ac.id

Abstract,

The birth of Law Number 1 of 2022 concerning HKPD or Central and Regional Financial Relations, which regulates central and regional finances and ultimately also relates to the management of village/district funds, to achieve better services in an efficient and disciplined manner. This activity aims to provide education to the policy-making community (RT/RW) in Sialang Munggu Village, Tuah Madani District, especially in the Paris Athaya housing complex regarding "Strengthening Economic Institutions" so that policymakers and the community can understand and understand the importance of strengthening institutions. Especially strengthening the economy so that policymakers can make development planning and budgeting at the sub-district level according to development needs to create an independent and advanced administrative area.

Keywords: Institutional strengthening, Economic strength, Institutional economics, Planning

Abstrak,

Lahirnya UU no 1 tahun 2022 tentang HKPD atau Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mana mengatur keuangan pusat dan daerah yang pada ujungnya juga berhubungan dengan pengelolaan dana desa/kelurahan, agar tercapai pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Tujuan dari kegiatan ini yakni memberikan penyuluhan kepada pemangku kebijakan masyarakat (RT/RW) yang ada di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani khususnya pada perumahan Paris Athaya, terkait "Penguatan Kelembagaan Ekonomi" agar pemangku kebijakan dan Masyarakat dapat mengerti dan memahami akan pentingnya penguatan kelembagaan terutama penguatan ekonomi sehingga pemangku kebijakan dapat membuat perencanaan dan penganggaran pembangunan di level kelurahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan guna mewujudkan wilayah administrasi yang mandiri dan maju.

Kata kunci: Penguatan kelembagaan, kekuatan ekonomi, ekonomi kelembagaan, perencanaan

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa di atur dalam pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi pengaturan desa berazaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya: Membina kehidupan masyarakat desa, Membina ekonomi desa, Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam aktivitas kelembagaan, maka kekuatan ekonomi harus menjadi perhatian penting bagi setaip pemangku kebijakan karena penguatan Ekonomi secara Lembaga, berarti penguatan ekonomi secara keseluruhan dimana kekuatan ini dapat memberikan pengaruh dan peranan kepada institusi dari sisi formal maupun informal bertujuan mengetahui kinerja ekonomi suatu institusi tersebut dari tatanan mikro hingga makro. salah satu kunci dari aspek ekonomi kelembagaan adalah tentang hak kepemilikan atau *property right*.

Peran ekonomi kelembagaan pada level makro adalah menyiapkan kerangka dasar (infrastruktur kelembagaan) agar proses produksi, pertukaran dan distribusi dalam aspek ekonomi, sosial, hukum, politik dan lain-lain berjalan sesuai yang diinginkan. Untuk mewujudkan penguatan ekonomi sebuah wilayah harus dimulai dari penguatan kelembagaan sehingga pemerintah dapat menyusun strategi pembangunan berdasarkan keunggulan/potensi wilayah (Fahrur et al, 2019; Hidayat & Darwin, 2017; Sjafrizal, 2018). Sehingga diketahui

keunggulan apa yang dimiliki oleh wilayah yang berada di bawah wewenangnya apakah wilayah tersebut memiliki keunggulan komparatif atau kompetitif.

Kelurahan Sialang Munggu khususnya Perumahan Paris Athaya Pratama yang berada pada wilayah administrasi pemerintahan RW 30 Kecamatan Tuah Madani memiliki banyak potensi ekonomi yang belum tertata dan terdata dengan maksimal sehingga perangkat kelurahan tidak memiliki data base terkait potensi ekonomi yang dimiliki wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah diatas dapat diketahui permasalahan yakni bagaimana membuat data base dari potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Kelurahan Sialang Munggu yang berada pada RW 30 khususnya "Perumahan Paris Athaya Pratama" dengan harapan terciptanya penguatan ekonomi kelembagaan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah Memberikan penyuluhan kepada pemangku kebijakan masyarakat (RT/RW) yang ada di Kelurahan Sialang Munggu, terkait:

- 1) Peningkatan pemahaman pemangku kebijakan RT/RW tentang penting penguatan kelembagaan, terutama di bidang ekonomi.
- 2) Meningkatkan peran aktif masyarakat/warga menumbuhkan dan mewujudkan kekuatan lembaga masyarakat terutama dibidang ekonomi.
- 3) Perangkat administratif mampu mengidentifikasi unit-unit ekonomi yang ada di Kelurahan Sialang Munggu terkhusus unit usaha ekonomi yang ada di Perumahan Paris Athaya.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di "Paris Athaya Pratama, Desa Sialang Munggu kelurahan Tuah Madani dengan durasi waktu satu hari. Dengan memberikan penyuluhan dan sosialisai menggunakan metode ceramah dan diskusi, oleh Narasumber yang berkompeten di bidang Ekonomi Kelambagaan. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan:

1. Pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran ekonomi kelembagaan dalam pengelolaan masyarakat dalam sebuah desa, dengan memberikan contoh-contoh desa yang maju dengan pengembangan ekonomi kelembagaan desa.
2. Memberikan support informasi kepada masyarakat melalui peningkatan partisipasi Masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintahan desa tentang segala potensi ekonomi yang mereka miliki agar pemangku kebijakan di desa memiliki informasi yang lengkap tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleharganya.
3. Memberikan pelatihan sederhana bagaimana cara memetakan potensi ekonomi yang di miliki oleh Masyarakat desa melalui komputerisasi sehingga aparat desa atau pemangku kebijakan di desa memiliki data base tentang potensi ekonomi Desa dan dapat terus mengupdate data setiap bulannya sehingga Desa Sialang Munggu diharapkan menjadi desa percontohan dalam pengembangan ekonomi kelembagaan.

Metode berikutnya setelah memberikan ceramah tentang pentingnya ekonomi kelembagaan dengan sesi diskusi dan tanya jawab seputar ekonomi kelembagaan dan bagaimana peran penting partisipasi masyarakat dan tersedianya data base potensi ekonomi masyarakat dalam upaya pengembangan dan penguatan Lembaga desa untuk mewujudkan kemajuan desa dan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di desa. Dengan diskusi dan tanya jawab secara terbuka dengan Masyarakat dan pemuka Masyarakat diharapkan dapat melengkapi hal-hal yang belum terakomodasi dari metode sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai kelembagaan ekonomi ditingkat paling bawah yakni kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Sialang Munggu khususnya pada Perumahan Paris Athaya Pratama mendapat respon yang positif, dari perangkat desa dan masyarakat setempat yang begitu antusias mendengarkan pemaparan materi tentang pentingnya ekonomi pemahaman aparat pemangku kebijakan di Kelurahan dan masyarakat tentang: Ekonomi kelembagaan, arti pentingnya peran aktif Masyarakat dalam memberikan informasi tentang potensi ekonomi yang dimiliki Masyarakat, serta pentingnya data base tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di wilayah administratif paling bawah. Sehingga pemangku kebijakan di kelurahan ataupun desa dapat menyusun perencanaan dan pengembangan wilayah administratifnya mengacu pada SDGs Desa yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Tujuannya adalah agar SDGs nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs desa secara terpadu.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Dengan adanya penguatan kelembagaan kelurahan diharapkan kelurahan dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan potensi wilayah yang ada sehingga tersusun arah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan yang berbasis kondisi faktual (evidence) di wilayah tersebut dan disamping itu pihak swasta dapat membantu pengembangan sub bisnis masyarakat sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Selain dari itu diharapkan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan goal's ke 16 yakni upaya perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga tercapainya kondisi yang efektif, akuntabel dan inklusif dalam setiap jenjang, sebagaimana yang dihasilkan dari hasil studi oleh Setianingtiyas et al (2019) terkait pemodelan indikator SDG's.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kedepan Kelurahan Sialang Munggu dapat berbenah dan memperbaiki serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam

penginputan data base dan pemetaan potensi ekonomi desa serta merancang dan menyusun rencana anggaran yang mengacu kepada kebutuhan Pembangunan dan pengembangan Desa sesuai dengan potensi ekonomi desa dengan berpedoman kepada undang-undang peraturan daerah tentang Pembangunan desa.

4. KESIMPULAN

Penguatan ekonomi kelembagaan desa merupakan sebuah keharusan dalam mewujudkan Pembangunan desa menuju Pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengembangan aktivitas ekonomi di desa tidak terlepas dari peran Lembaga desa dalam Menyusun rencana pengembangan desa berdas arkan potensi desa. Potensi desa dapat dikembangkan jika perangkat desa memiliki data base tentang potensi desa, terutama potensi ekonomi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Riau yang telah memberi dukungan **finansial** terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Sialang Munggu yang telah berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrur, R. M., Hidayat, M., & Darwin, R. (2019). Analisis Sektor Potensial dan Strategi Pengembangan Perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(2), 183–192. Retrieved from <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1552>
- Hidayat, M., & Darwin, R. (2017). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Media Trend*, 12(2), 156–167. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i2.3081>
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(2), 61–74. <https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-74>
- Sjafrizal. (2018). *Regional Economic Analysis and Application in Indonesia* (Bahasa). Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- UU no 1 tahun 2022 tentang HKPD atau Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah